

**FAKTOR KENERJA KEUANGAN DAN ANALISA RASIO
DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS
PENERIMAAN DAERAH**

(Study Kasus Kabupaten Merauke)

Richard Cristian Somalinggi Parantean, Hendrik Lembang,
Adam Gau Kamagai

**FUNGSI PENGUKURAN LIKUIDITAS TERHADAP
KESEHATAN PERUSAHAAN PT. X DI MERAUKE**

Ari Susanti, Marlina Manurung, Konstatina Dorkas

**INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS
AUDIT PADA PT. X DI MERAUKE**

Ervina Dewi, Evelin Mary, Adam Gau Kamagai

**KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP APBD
KABUPATEN MERAUKE**

Yohanes Bosco Nambut, Maria Imakulata Mega Sari Waka,
Muhamad M Matdoan

Jurnal

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung	: Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa
Penanggung jawab	: Yohanes Ngamal, SE.,M.Si
Dewan Redaksi	:
Ketua	: Henricus Raba, SE.,M.Si
Wakil ketua	: Inez Cara Alexander Phoek, B.Com.,M.M
Anggota	: Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501
Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

DAFTAR ISI

ii

01

FAKTOR KENERJA KEUANGAN
DAN ANALISA RASIO
DALAM MENGUKUR EFEKIVITAS
PENERIMAAN DAERAH
(Study Kasus Kabupaten Marauke)
Richard Cristian Somalinggi
Parantean, Hendrik Lembang,
Adam Gau Kamagai

25

FUNGSI PENGUKURAN LIKUIDITAS
TERHADAP KESEHATAN
PERUSAHAAN PT. X DI MERAUKE
**Ari Susanti, Marlina Manurung,
Konstatina Dorkas**

31

INDEPENDENSI AUDITOR DAN
KUALITAS AUDIT PADA PT. X DI
MERAUKE
Ervina Dewi, Evelin Mary,
Adam Gau Kamagai

45

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP APBD
KABUPATEN MERAUKE
Yohanes Bosco Nambut, Maria Imakulata
Mega Sari Waka,
Muhamad MMatdoan

KONTRIBUSI RETRIBUSITERHADAP APBD KABUPATEN MERAUKE

Yohanes Bosco Nambut, Maria Imakulata Mega Sari Waka, Muhamad M Matdoan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the contribution of the original regional income to the APBD contribution of the components of the regional original income (such as the regional tax, regional levies, the results of separate wealth management and other legitimate PAD) to the total PAD and APBD. The data used are secondary data obtained from the results of research in Merauke Regency Dispenda for the period 2014-2018.

The results of the study show in the table which shows that the average Regional Original Income to the Regional Revenue and Expenditure Budget in Merauke Regency for the 2014- 2018 period is 58.95%. Average Contributions of Regional Original Revenue Components to Regional Original Revenues such as: Regional Taxes 14.84%, Regional Retribution of 8.25%, Results of Management of Separate Regional Assets 0.83%, and Others Legitimate Local Revenue 76,04%. And then the average Contribution of Regional Original Revenue Components to Regional Revenues and Regional Expenditures such as: Local Taxes 1.69%, Regional Retribution 0.86%, Results of Management of Separated Regional Wealth 0.08%, and Others Original Income Legitimate Area 9.11%. Where overall this sector's revenues must be increased to get maximum profit in increasing Regional Expenditure and Expenditure in Merauke Regency.

Keywords: Regional Budget, Regional Original Income and Contributions.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Kebijakan untuk memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak, retribusi daerah, dan penerimaan daerah lainnya. Melalui PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa uraian yang telah disebutkan sangat penting dan masing-masing memberikan sumbangan bagi penghasilan PAD. Sebagai daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari PAD. Kabupaten Merauke memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, sehingga seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki kabupaten Merauke, dapat mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatnya perekonomian masyarakat. Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah.

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia pertama kali digulirkan pada akhir tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) no. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi daerah, Namun meski telah ditetapkan sejak tahun 1999, UU ini baru berlaku efektif ditahun 2001. Secara umum, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada pada dalam wilayahnya, salah satunya adalah desentralisasi fiskal dimana tiap daerah diberi kelulusan untuk mengelolah keuangannya masing-masing, desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakatnya dari pada pemerintah pusat. Komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi fiskal makin nampak, hal ini terlihat dari peningkatan dana transfer setiap tahun. Namun pada saat pemerintah pusat terus berupaya untuk menjalankan komitmen dalam menerapkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan dana transfer ke daerah disetiap tahun anggaran, sebuah fenomena yang menarik justru terjadi di daerah-daerah, yaitu minimnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Dari beberapa hasil penelitian tentang analisis APBD diantaranya adalah Berutu (2009) dan Sudarwanto (2013) menyatakan bahwa analisis APBD dapat diketahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan tinggi rendahnya pelayanan publik yang menggambarkan peran pemerintah daerah sebagai aktor dan fasilitas pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini di beri judul **"Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Merauke Tahun 2014-2018"**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Merauke 2014- 2018?
2. Bagaimana kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah dalam PAD Kabupaten Merauke 2014-2018?
3. Bagaimana kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Merauke 2014-2018?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD kabupaten Merauke 2014-2018
2. Untuk mengetahui kontribusi komponen pendapatan Asli Daerah dalam PAD kabupaten Merauke 2014-2018
3. Untuk mengetahui kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah dalam APBD kabupaten Merauke

KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) dan akuntansi pemerintahan terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Merauke.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan pendaptan daerah khususnya dalam rangka pengelolaan APBD bagi pemerintah Kabupaten Merauke.

3. Manfaat Praktis

Penulisan berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang terkait dengan

efektivitas pelayanan publik dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORI

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2011) dengan judul "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu". Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, analisis kontribusi komponen PAD, analisis tingkat kontribusi komponen PAD terhadap pendapatan daerah serta analisis pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah.

"Wenur (2013) dengan judul "Analisis kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah kota Bitung". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dengan data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai sampai sejauh mana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

Hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui PAD sebagian besar dananya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun mengalami peningkatan dan telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. PAD Kota Bitung dari persentase yang diperoleh kontribusi PAD dalam membiayai daerah masih dibawah 10 persen".

"Astuti (2019), tentang "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018". Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD Kabupaten Sleman memperlihatkan bahwa secara keseluruhan PAD tahun 2012-2016 sudah efektif karena realisasi PAD lebih besar dengan yang ditargetkan, artinya persentase tingkat efektivitasnya melebihi 100%. Tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Tahun 2013 merupakan tahun dimana persentase tingkat efektivitas PAD adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 150,55%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan

menurunnya tingkat efektivitas PAD tahun 2014 disebabkan karena pendapatan retribusi daerah di tahun 2014 tidak memenuhi apa yang sudah ditargetkan atau tidak maksimal.

2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang telah dilakukan secara keseluruhan, persentase kontribusi dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan tetapi klasifikasi kriteria kontribusi di tahun-tahun tersebut pada kondisi kurang dan sedang. Artinya realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memberikan kontribusi kurang dari 31%. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berasal dari Dana Perimbangan. 3. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2017 sebesar 809.970.380.800 dan 2018 sebesar 912.572.624.000, artinya PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan".

Pendapatan Asli Daerah

"Menurut Ismanthono (2003:124) Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah. PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat".

"PAD merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD, sedangkan unsur terpenting dalam PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD".

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Handoko (2013:2) kontribusi adalah besaran

sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penghasilan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diwajibkan berdasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tulang punggung pembiayaan daerah ialah PAD, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD, semakin besar sumbangan yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8. Semua penghasilan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Pada Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah".

Menurut Amir (2005:3) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Yang merupakan suatu instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah, karena APBD merupakan perencanaan strategi yang menghasilkan ukuran kinerja, sehingga dapat dipakai sebagai acuan apakah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Perda APBD).

"Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah ditingkat Kota/Kabupaten diberi keluasaan dalam melaksanakan semua urusan pemerintah mulai dari perenca-

naan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. APBD merupakan pendapatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4) Periode anggaran biasanya satu tahun".

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut". Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi PAD Kabupaten Merauke selama tahun 2014-2018. Kriteria sampel yang ditentukan berdasarkan kategori: 1)

Laporan realisasi PAD Kabupaten Merauke yang terdaftar selama tahun 2014-2018. 2) Laporan realisasi PAD Kabupaten Merauke yang lengkap dan sesuai variabel yang di tentukan selama tahun 2014-2018.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:38) "Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Variabel merupakan sesuatu yang memberikan beberapa macam nilai. Maka, ada beberapa variabel yang mendasari penelitian ini diataranya :

1. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.
2. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan

daerah yang menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan atas desentralisasi. Herlina (2005:38)

3. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah imbalan langsung dan seimbang, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.
7. Kontribusi adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber PAD dan komponennya, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah terhadap PAD itu sendiri dan terhadap APBD yang dilihat berdasarkan laporan APBD yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Merauke dalam persentase setiap tahun anggaran 2014-2018".

METODE ANALISIS DATA

Dalam melakukan pengolahan data dan menganalisis hasil penelitian, langkah dalam analisis ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Sumbangan PAD pada APBD di Kabupaten Merauke

Penguraian ini untuk mengetahui besarnya tingkat sumbangan PAD pada APBD, dengan rumus:

$$\times 100\%$$

b. Analisis Sumbangan macam-macam PAD pada PAD di Kabupaten Merauke

Penguraian ini untuk mengetahui besarnya tingkat sumbangan macam-macam PAD pada PAD, dengan rumus:

$$\times 100\%$$

c. Analisis Sumbangan macam-macam PAD pada APBD di Kabupaten Merauke

Penguraian ini untuk mengetahui besarnya tingkat sumbangan macam-macam PAD pada APBD, dengan rumus:

$$\times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Kontribusi PAD terhadap total APBD kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi total APBD	Kontribusi
2014	135.785.489.734	1.643.100.601.431	8,26%
2015	175.624.054.291	1.787.701.828.638	9,82%
2016	200.083.202.453	1.831.923.426.365	10,92%
2017	325.525.663.295	2.188.064.292.576	14,87%
2018	340.922.083.981	2.264.766.514.588	15,05%

Sumber : Hasil Analisis 2019 (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis yang mengukur besarnya tingkat sumbangan PAD pada APBD pada tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Merauke selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi PAD dari masa 2014 sampai dengan 2018 terus terjadi peningkatan, kenaikan yang cukup pada tahun anggaran 2018. Sejalan dengan peningkatan PAD, dan APBD juga mengalami hal yang sama setiap tahunnya. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap tingkat PAD dari masa 2014 sampai masa 2018 Pada tahun anggaran 2014 PAD memberikan kontribusi sebesar 8,26% pada APBD. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,56% sehingga kontribusi PAD pada tahun 2015 meningkat dari 8,26% menjadi 9,82% sejalan dengan peningkatan realisasi PAD. Peningkatan kontribusi PAD dari tahun 2015 ketahun anggaran 2016 relatif hampir sama dengan peningkatan kontribusi PAD yang terjadi pada tahun sebelumnya yakni hanya sebesar 1,1%, dari tahun anggaran 2015 sebesar 9,82% menjadi 10,92% pada tahun 2016. Pada tahun 2015 realisasi PAD sebesar Rp.175.624.054.291 mengalami peningkatan sebesar Rp.24.459.148.291 yaitu menjadi Rp.200.083.202.453 pada tahun anggaran 2016. Begitu juga dengan APBD mengalami kenaikan dari Rp.1.787.701.828.638 pada tahun 2015 menjadi Rp.1.831.923.426.365 pada tahun 2016 terjadi kenaikan

menjadi sebesar Rp.44.221.597.727. Pada tahun 2017 kontribusi PAD kembali mengalami kenaikan dari 10,92% menjadi 14,87% hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya semakin baik meski hanya mengalami kenaikan sebesar 3,95%, realisasi PAD dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp.200.083.202.453 mengalami peningkatan menjadi Rp.325.525.663.295 atau meningkat sebesar Rp.125.442.460.842. APBD juga mengalami peningkatan dari Rp.1.831.923.426.365 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.188.064.292.576 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp.356.140.866.211. Keadaan yang sama terjadi pada tahun 2018, pada tahun anggaran ini PAD, dan juga realisasi APBD serta kontribusi PAD terus mengalami kenaikan yang relatif baik yaitu sebesar 0,18% dari tahun 2017 sebesar 14,87% menjadi 15,05% pada tahun 2018. Jumlah kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD dari tahun 2014 sampai 2018 secara keseluruhan sebesar 58,92%. Dengan demikian PAD yang dipungut di Kabupaten Merauke mempunyai peran yang cukup besar terhadap APBD.

Tabel 2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total PAD Kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi Total PAD	Realisasi Total Pajak Daerah	Kontribusi
2014	135.785.489.734	23.470.520.177	17,28%
2015	175.629.054.291	27.244.911.416	15,51%
2016	200.083.202.453	32.293.793.766	16,14%
2017	325.525.663.295	40.866.209.312	12,55%
2018	340.922.083.981	43.475.365.559	12,75%

Sumber : Hasil Analisis 2017 (Diolah)

Pada tabel 2 tersebut diketahui bahwa besarnya total sumbangan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Merauke tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 total kontribusi pajak daerah sebesar Rp.23.470.520.177 dengan persentase 17,28%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.27.244.911.416 dan terjadi penurunan persentase menjadi 15,51%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp.32.293.793.766 dengan tingkat kontribusi sebesar 16,14%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.40.866.209.312 tetapi

persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 12,55% atau turun sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 kontribusi pajak daerah terus meningkat menjadi Rp.43.475.365.559 dengan tingkat kontribusi sebesar 12,75%. Jumlah total kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 74,23% dengan rata-rata sebesar 14,84%.

Tabel 3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi Total PAD	Realisasi Total Retribusi Daerah	Kontribusi
2014	135.785.489.734	20.284.222.228	14,93%
2015	175.629.054.291	16.981.194.113	9,66%
2016	200.083.202.453	15.233.482.779	7,61%
2017	325.525.663.295	15.662.532.460	4,81%
2018	340.922.083.981	14.457.247.781	4,24%

Sumber: Hasil Analisis 2019 (Diolah)

Pada tabel 9 tersebut diketahui bahwa besarnya sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Merauke tahun 2014 sampai tahun 2018 terus terjadi penurunan. Pada tahun 2014 pendapatan retribusi berjumlah Rp.20.284.222.228 dengan persentase sebesar 14,93%, pada

masa 2015 pendapatan retribusi turun menjadi Rp.16.981.194.113 dengan persentase tingkat sumbangan retribusi daerah terjadi penurunan sebesar 5,27% menjadi 9,66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi retribusi juga mengalami penurunan menjadi Rp.15.233.482.779 dan persentase juga ikut mengalami penurunan menjadi 7,61% atau sebesar 2,05%. Selanjutnya untuk tahun anggaran 2017 kembali terjadi kenaikan pendapatan retribusi menjadi Rp.15.662.532.460 setelah merosot pada tahun 2016 dan persentase kontribusi retribusi kembali mengalami penurunan menjadi 4,81%. Dan pada masa 2018 tingkat retribusi kembali terjadi penurunan senilai Rp.14.457.247.781 serta persentase kontribusi retribusi juga mengalami penurunan menjadi 4,24% atau 0,57% dari tahun sebelumnya. Jumlah kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD secara keseluruhan sebesar 41,25% dengan rata-rata sebesar 8,25%.

Tabel 4
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Total PAD Kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kontribusi
2014	135.785.489.734	1.504.641.370	1,10%
2015	175.629.054.291	1.879.378.996	1,07%
2016	200.083.202.453	1.818.642.737	0,90%
2017	325.525.663.295	1.853.306.550	0,56%
2018	340.922.083.981	1.887.970.364	0,55%

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Melihat dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa tingkat peran yang dapat diberikan melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinilai masih relatif kecil, hal ini dilihat melalui total pendapatan daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meski mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 total pendapatan daerah sebesar Rp.1.504.641.370 dengan persentase sebesar 1,10%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.879.378.996 dengan persentase sebesar 1,07%. Pada tahun 2016 pada total pendapatan daerah mengalami penurunan yakni menjadi Rp.1.818.642.737 hal ini juga diikuti dengan penurunan persentase kontribusi pendapatan sebesar 0,90%. Kemudian pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.853.306.550 dengan persentase 0,56% dan pada tahun 2018 total pendapatan daerah juga mengalami kenaikan yang sebesar Rp.1.887.970.364 dengan persentase sebesar 0,55% atau turun sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Jumlah sumbangan komponen ini terhadap total PAD secara keseluruhan sebesar 4,18% dengan rata-rata sebesar 0,83%.

Tabel 5
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Terhadap PAD Kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Lain-lain yang Sah	Kontribusi
2014	135.785.489.734	90.526.105.959	66,66%
2015	175.629.054.291	129.518.569.766	73,74%
2016	200.083.202.453	150.737.283.171	75,33%
2017	325.525.663.295	267.143.614.972	82,06%
2018	340.922.083.981	281.101.500.277	82,45%

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kabupaten Merauke pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 total lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.90.526.105.959 dengan persentase kontribusi 66,66% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.129.518.569.766 dengan persentase kontribusi sebesar 73,74% atau naik sebesar 7,08% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ke 2016 kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD kembali terjadi kenaikan sebesar Rp.150.737.283.171 dengan kenaikan persentase kontribusi sebesar 75,33%. Pada tahun 2017 terus mengalami yang namanya kenaikan sebesar Rp.267.143.614.972 dan persentase kontribusi naik menjadi 82,06%. Pada tahun 2018 total kontribusi Lain-lain PAD yang sah meningkat kembali menjadi Rp.281.101.500.277 dengan kenaikan persentase kontribusi sebesar 82,45% atau sebesar 0,39% dari tahun sebelumnya.

Tabel 6
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap APBD

Tahun	Realisasi APBD	Realisasi Total Pajak Daerah	Kontribusi
2014	1.643.100.601.431	23.470.520.177	1,42%
2015	1.787.701.828.638	27.244.911.416	1,52%
2016	1.831.923.426.365	32.293.793.766	1,76%
2017	2.188.064.292.576	40.866.209.312	1,86%
2018	2.264.766.514.588	43.476.365.559	1,91%

Sumber: Hasil Analisis 2019 (Diolah)

Pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa sumbangan Pajak daerah terhadap APBD untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini lebih disebabkan karena realisasi pajak daerah yang diperoleh pemerintah untuk setiap tahun juga terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak terhadap kenaikan persentase kontribusi pajak daerah yang dapat diberikan kepada daerah melalui PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke. Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah sebesar Rp.23.470.520.177 dengan persentase sebesar 1,41% naik menjadi 1,52% pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 1,76% meski kenaikan ini hanya sebesar 0,24% dari tahun sebelumnya. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2017 naik sebesar 1,86% menjadi 1,91% pada tahun 2018.

Jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah dari tahun 2014-2018 sebesar 8,47% dengan rata-rata persentase sebesar 1,69%. Meski peningkatan kontribusinya masih dibawah 50% dan belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 7
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Total APBD

Tahun	Realisasi APBD	Realisasi Total Retribusi Daerah	Kontribusi
2014	1.643.100.601.431	20.284.222.228	1,23%
2015	1.787.701.828.638	16.981.194.113	0,90%
2016	1.831.923.426.365	15.233.482.779	0,83%
2017	2.188.064.292.576	15.662.532.460	0,71%
2018	2.264.766.514.588	14.457.247.781	0,63%

Sumber : Hasil Analisis 2019 (Diolah)

Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi yang dapat diberikan melalui sektor retribusi daerah terhadap APBD Kabupaten Merauke tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 kontribusi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Merauke mengalami penurunan, disamping itu secara keseluruhan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat realisasi dengan tidak baik, dalam arti penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan tidak melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu dari target penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2014 sebesar Rp.31.890.000.000 dan realisasi sebesar Rp.20.284.222.228 kemudian pada tahun 2015 target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.16.780.000.000 terealisasi sebesar Rp.16.981.194.113 atau turun dari 1,23% menjadi 0,90%. Pada hal ini tidak dapat dipertahankan karena pada masa 2016 persentase terjadi penurunan kembali yaitu sebesar 0,83%. Sementara ditahun 2017 besarnya total penerimaan sebesar Rp.15.622.532.460 dimana memberikan kontribusi sebesar 0,71% kemudian ditahun 2018 juga terus mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,71%. kurangnya nilai realisasi penerimaan retribusi daerah menjadi jumlah kontribusi secara keseluruhan hanya sebesar 4,3% dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,86%

Tabel 8
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Total APBD Terhadap APBD

Tahun	Realisasi APBD	Realisasi Total pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kontribusi
2014	1.643.100.601.431	1.504.641.370	0,09%
2015	1.787.701.828.638	1.879.378.996	0,10%
2016	1.831.923.426.365	1.818.642.737	0,09%
2017	2.188.064.292.576	1.853.306.550	0,08%
2018	2.264.766.514.588	1.887.970.364	0,08%

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa kontribusi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap APBD tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Secara penghasilan dari komponen ini terjadi peningkatan. Yang mana pada masa 2014 senilai Rp.1.643.100.601.431 dengan bantuan kontribusi 0,09% menjadi Rp.1.787.701.828.638 ditahun 2015 dengan kontribusi 0,10%. Pada tahun 2016 penerimaan terus mengalami kenaikan sebesar Rp.1.831.923.426.365 dengan kontribusi 0,09% hingga pada tahun 2017 sebesar Rp.2.188.064.292.576 dengan kontribusi 0,08%. Penerimaan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah dinilai sangat minim, hingga pada tahun 2018 sebesar Rp.2.264.766.514.588 dengan kontribusi 0,08%. Hal ini berdampak kurang baik bagi penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke. Secara keseluruhan jumlah pemberian komponen dari masa 2014-2018 hanya sebesar 0,44% dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,08%. Sehingga penghasilan dari komponen ini masih minim dan harus ditingkatkan oleh pemerintah.

Tabel 9
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total APBD Kabupaten Merauke

Tahun	Realisasi APBD	Realisasi Total Lain-lain PAD yang Sah	Kontribusi
2014	1.643.100.601.431	90.526.105.959	5,50%
2015	1.787.701.828.638	129.518.569.766	7,24%
2016	1.831.923.426.365	150.737.283.171	8,22%
2017	2.188.064.292.576	267.143.614.972	12,20%
2018	2.264.766.514.588	281.101.500.277	12,41%

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa pemberian Lain-lain PAD yang sah terhadap APBD secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus

mengalami kenaikan dan fluktuatif. Dikatakan fluktuatif karena kontribusi dari sektor ini terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari tahun 2014 peran Lain-lain PAD yang sah pada APBD senilai 5,50% dan pada tahun 2015 kembali terjadi kenaikan pada peran Lain-lain PAD yang sah sebesar 7,24% naik sebesar 1,74% dari tahun sebelumnya. Disaat tahun 2016 peran lain-lain PAD yang sah terjadi kenaikan sebesar 0,98% menjadi 8,22%. Kembali terjadi kenaikan pada tahun 2017 sebesar 3,98% menjadi 12,20%. Dan pada waktu tahun 2018 peran lain-lain PAD yang sah terjadi kembali dengan kenaikan 12,20% pada tahun sebelumnya dan menjadi 12,41% di tahun 2018. peran lain-lain PAD yang sah lebih diandalkan jika di bandingkan dengan penerimaan lainnya. Adapun jumlah pemberian secara keseluruhan sebesar 86,16% dengan nilai rata-rata pemberian lain-lain PAD yang sah sebesar 17,23% tiap tahunnya. Dengan demikian peran lain-lain PAD yang sah sudah memberikan perannya terhadap APBD Kabupaten Merauke.

PEMABAHASAN

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD di Kabupaten Merauke

Pemberian kontribusi ini adalah besarnya suatu iuran yang mana pendapatan PAD dan komponen PAD pada PAD dan APBD yang mana dapat dilihat dalam persentase setiap tahunnya. Terlihat adanya kenaikan persentase kontribusi PAD terhadap APBD selama tahun 2014 sampai 2018. Dimana pada 2014 tingkat pemberian sebesar 8,26% yang kemudian naik menjadi 9,82% pada tahun 2015. Kemudian pada masa 2016 tingginya tingkat sumbangan yang diberikan oleh PAD pada APBD juga terjadi kenaikan menjadi 10,92%. Sedangkan ditahun 2017 tingkat pemberian PAD juga terus naik hingga 14,87% sampai pada tahun 2018 sebesar 15,05%. Kenaikan jumlah kontribusi PAD yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2017 disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah dalam dua tahun tersebut cukup besar, sehingga mampu meningkatkan jumlah penerimaan PAD.

Kenaikan pemberian dari tahun ke tahun berarti bahwa pemerintah sudah cukup meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sebagian besarnya PAD

diperoleh melalui sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah karena kedua komponen ini selalu menghasilkan jumlah dana yang besar tiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan dari data realisasi APBD Kabupaten Merauke 2014 hingga 2018 sumber keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari bantuan dana pusat yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Untuk setiap tahun pos-pos komponen PAD selalu memberi suntikan dana yang cukup besar terhadap daerah. Sehingga saat dilakukan analisis kontribusi PAD terhadap APBD. Angka yang diperoleh PAD menjadi begitu kecil jika dibandingkan dengan APBD. Namun jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Merauke sudah cukup besar memberikan kontribusi yang berarti bagi APBD, dengan jumlah kontribusi secara keseluruhan sebesar 58,92% dengan rata-rata sebesar 11,78. Artinya PAD sudah cukup besar memberikan iuran atau sumbangan bagi APBD Kabupaten Merauke.

Kontribusi komponen PAD terhadap PAD di Kabupaten Merauke

a. Pajak Daerah terhadap total PAD

Sumber komponen ini adalah penghasilan terutama untuk suatu daerah hingga sangat diharapkan penghasilan sumber komponen ini dapat menyumbang besar pada PAD dan APBD. Tingginya sumbangan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Merauke terjadi penurunan. Pada masa 2014 kontribusi pajak daerah terhadap PAD setinggi 17,28%, pada 2015 sebesar 15,51%, tahun 2016 sebesar 16,14%, tahun 2017 sebesar 12,55% dan tahun 2018 sebesar 12,75%

b. Retribusi Daerah terhadap total PAD

Komponen ini salah satu dari pendapatan PAD. Kontribusi ini secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan realisasi retribusi yang fluktuatif dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat melalui analisis kontribusi retribusi pada tabel 9 diatas yang mana pada tahun 2014 persentase sebesar 14,93% turun hingga sebesar 4,24% pada tahun 2018. Penurunan tingkat persentase kontribusi tahun 2014 sampai tahun 2018 dikarenakan kenaikan anggaran retribusi daerah yang tidak seimbang dengan kenaikan nilai PAD secara keseluruhan. Jika dilihat dari tahun 2014 sampai 2018,

berdasarkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Merauke sangat relative kecil. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan kontribusi retribusi hanya sebesar 41,25% dengan rata-rata sebesar 8,25%. Dan keseluruhan besarnya nominal retribusi yang realisasi selalu terjadi penurunan. Yang mana pada masa 2014 senilai Rp.20.284.222.228 menurun menjadi Rp.14.457.247.781 meski terus turun dari tahun ke tahun.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap total PAD

Sumbangan komponen ini dalam PAD secara keseluruhan dari masa 2014 sampai masa 2018 realisasi terus mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup wajar. Namun pada persentase kontribusinya masih sangat kecil dari tahun ke tahun. Jumlah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara keseluruhan hanya sebesar 4,18% dengan rata-rata kontribusi 0,83%. Yang mana pemerintah kurang berkoordinasi dengan BUMD dalam hal ini dana yang diperoleh BUMD melalui PDAM, BUKP. Yang mana badan merupakan sumber pendapatan komponen tersebut. Maka dalam upaya mengkoordinasikan BUMD harus lebih ditingkatkan agar komponen ini bias berperan lebih besar sumbangannya pada PAD.

d. Lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD

Kontribusi komponen ini pada tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukan persentase yang cukup besar. Realisasi komponen ini tidak pernah melampaui pendapatan yang sudah ditetapkan, dengan jumlah kontribusi sebesar 380,24% dengan rata-rata sebesar 75,04%. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan komponen ini sudah bagus dan berpotensi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Merauke.

Kontribusi komponen PAD terhadap APBD di Kabupaten Merauke

a. Pajak daerah terhadap APBD

Data yang terlihat pada kontribusi pajak daerah terhadap APBD secara keseluruhan pada tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Jika dilihat jumlah sumbangan pajak daerah secara keseluruhan pada APBD selama masa 2014 sampai 2018 sebesar 8,47%

dengan rata-rata sebesar 1,69%. Hal ini merupakan bahwa pemerintahan kabupaten Merauke masih belum mampu melakukan pendanaan daerah. Pemerintahan daerah sangat masih bergantung kepada bantuan pemerintahan pusat untuk menganggarkan macam kegiatan pemerintahan. Setidaknya harus mengambil tindakan yang dapat atensi masyarakat agar membayar pajak. Seperti halnya mempercepat dalam pengurusan administrasi seperti balik nama kendaraan dan diberi sanksi kepada masyarakat apabila tidak membayar atau terlambat untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan begitu penerimaan komponen ini akan lebih mudah meningkat APBD.

b. Retribusi daerah terhadap APBD

Penurunan pendapatan realisasi retribusi daerah terjadi pada masa 2014 sampai tahun 2016 dari Rp20.284.222.228 turun hingga Rp14.457.247.781 begitupun dengan APBD yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun penerimaan retribusi terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan tersebut tidak dapat menyumbangkan begitu besar pada APBD maka jumlah kontribusi retribusi daerah terhadap APBD semasa tahun 2014 sampai tahun 2018 hanya sebesar 4,30% dengan rata-rata sebesar 0,86%. Seperti yang terlihat pada tabel 13 diatas terdapat penurunan kontribusi dari 1,23% dimasa 2014 turun senilai 0,63% ditahun 2018. Agar dapat meningkatkan perannya retribusi daerah dalam APBD, yang mana harus mengadakan macam-macam cara dan strategi yang baik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap total APBD

Kontribusi dari komponen ini dilihat selalu mengalami kenaikan selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Meski demikian kenaikan yang terjadi hanya dapat memberikan jumlah kontribusi sebesar 0,44% dan rata-rata sebesar 0,08%. Minimnya jumlah nominal hasil realisasi ini membuat kontribusi yang dapat diberikan terhadap penerimaan APBD, dalam hal ini seakan sumbangan komponen ini semakin tidak ada perannya dalam peningkatan APBD Kabupaten Merauke menjadi sangat kecil.

d. Lain-lain PAD yang sah terhadap total APBD

Komponen ini berbeda dengan komponen lainnya yang terdapat pada PAD. Pada masa 2014 realisasi kontri-

busi sebesar 5,50% naik hingga 12,41% ditahun 2018. Meski begitu besar, namun realisasi kontribusinya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kenaikan persentase kontribusi Lain-lain PAD yang sah dengan jumlah keseluruhan kontribusi sebesar 45,57% dan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 9,11%, ini jauh lebih baik ketimbang dibandingkan dengan penerimaan kontribusi sebelumnya.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan dari komponen ini, yang mana perlu mengadakan terjun langsung kelapangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sumber penerimaan komponen ini. Seperti halnya berkaitan dengan penjualan hasil peternakan, pertanian, perikanan dan sebagainya. Bekerja sama yang baik antara Badan pemungut PAD, Biro perusahaan, dan masyarakat juga memerlukan pembinaan supaya prosesnya dapat berjalan seimbang dan dapat ditinggalkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulannya Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tidak begitu besar. Hal ini dikarenakan peningkatan APBD Kabupaten Merauke juga mengalami peningkatan yang cukup besar dan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Merauke masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Merauke dari tahun 2014 sampai tahun 2018 angkanya sangat fluktuatif. Meskipun demikian penerimaan kontribusi dari masing-masing komponen PAD besar setiap tahunnya. Kontribusi paling tinggi diperoleh melalui Lain-lain PAD yang sah sudah cukup

besar karena terus meningkat setiap tahunnya, Sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi yang baik terhadap total penerimaan PAD.

Kontribusi komponen PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke dari tahun 2014 sampai 2018 masih rendah, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan APBD yang secara keseluruhan sangat besar dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga kontribusi yang diberikan dari masing-masing komponen tidak begitu besar terhadap APBD Kabupaten Merauke.

Keterbatasan

Saat ini Penelitian mempunyai keterbatasan yang diperlukan untuk meningkatkan, adapun keterbatasan saat ini diantaranya:

- 1) Penelitian saat ini masih belum menggunakan data primer yaitu wawancara lebih lanjut,
- 2) Waktu yang diteliti hanya pada tahun 2014 sampai 2018.
- 3) Pengolahan data hanya menggunakan analisis kontribusi.

Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian diharapkan:

- 1) Supaya menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Merauke.
- 2) Tahun yang diteliti sebaiknya lebih dari waktu yang telah diteliti atau dapat melakukan penelitian terbaru.
- 3) Bagi pemerintah Kabupaten Merauke dapat menentukan target anggaran yang pasti terhadap lain-lain PAD yang sah untuk setiap tahunnya agar angka kontribusi dalam realisasi anggaran dapat konsisten setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, Deas. 2012. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Akuntansi.
- Astuti, N. P. 2019. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah kabupaten sleman 2012-2016*. Jurnal Akuntansi
- Barutu, Christophorus. 2009. *Analisis APBD Dapat Menggerakan Roda Perekonomian*. Jurnal akuntansi.
- Baihaqi, Fauzan. 2011. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Kontribusi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ismanthono, Henricus. 2003. *Pendapatan Asli Daerah*. Malang: FE Unibraw.
- Mardiasmo, 2011. *Retribusi Daerah*. Edisi Revisi Tahun 2011. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Octovido, Fahri. Eka. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal Akuntansi.
- Sugiyono, 2015. *Variable Penelitian*. bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah / Otonomi Daerah*. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. 2005.
- Bandung: Diperbanyak PT. Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Wenur, Gebriany. Pirade. 2013. *"Analisis kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah kota Bitung"*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Akuntansi.
- *) Ahmad Fawaidurrohman Adalah Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) Noor Shodiq Askandar Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang
- ***) Afifuddin Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.